



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

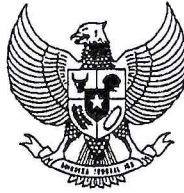
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU  
ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN  
PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR  
25 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, kebutuhan penataan indikator kabupaten/kota layak anak, dan berakhirnya rencana aksi nasional penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak tahun 2020-2024, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu membentuk Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian dalam menyusun Peraturan Presiden;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;

Mengingat ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

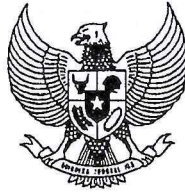
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
3. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK.

KESATU : Membentuk Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEDUA : Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas untuk:
- memberikan masukan terhadap substansi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
  - melakukan penyiapan, pengolahan, dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak; dan
  - melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak kepada menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian/pimpinan lembaga terkait masing-masing.
- KETIGA : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan /atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2025

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN  
DAN/ATAU ANTARNONKEMENTERIAN  
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN  
PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN  
2021 TENTANG KEBIJAKAN  
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	NAMA/KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	INSTANSI
I.	<b>Pengarah:</b> Titi Eko Rahayu	Sekretaris Kementerian	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
II.	<b>Ketua:</b> Pribudiarta Nur Sitepu	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
III.	<b>Wakil Ketua:</b> Fatahillah	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
IV.	<b>Sekretaris:</b> Agung Budi Santoso	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
V.	<b>Anggota:</b>		
1.	Lydia Silvanna Djaman	Deputi Bidang Perundang- undangan dan Administrasi Hukum	Kementerian Sekretariat Negara
2.	Rini Handayani	Staf Ahli Bidang Partisipasi dan Lingkungan Strategis	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

<b>NO.</b>	<b>NAMA/KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN</b>	<b>INSTANSI</b>
3.	Ariza Agustina	Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Perlindungan Perempuan	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.	Hayu Sihwati Lestari	Asisten Deputi Kesejahteraan Rakyat	Kementerian Sekretariat Negara
5.	Nia Reviani	Plt. Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
6.	Rita Erawati	Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
7.	Paudah	Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV	Kementerian Dalam Negeri
8.	Moch Salim Somad	Direktur Sekolah Dasar	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
9.	Cecep Khairul Anwar	Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah	Kementerian Agama
10.	Amsal Yowei	Direktur Urusan Agama Kristen	Kementerian Agama
11.	Trimo	Direktur Pendidikan Hindu	Kementerian Agama
12.	Imam Syaukani	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri	Kementerian Agama
13.	Irma Ardiana	Direktur Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
14.	Ardhi Yusuf	Direktur Pengendalian Kerusakan Lahan	Kementerian Lingkungan Hidup
15.	Nurhadisaputra	Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca	Perpustakaan Nasional



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

<b>NO.</b>	<b>NAMA/KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN</b>	<b>INSTANSI</b>
16.	Dwi Puspasari	Plt. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan/Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Kementerian Kesehatan
17.	Devy Nia Pradhika	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
18.	Eko Novi Ariyanti Rahayu Damayanti	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
19.	Endah Sri Rejeki	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
20.	Muhammad Ihsan	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
21.	Dwi Jalu Atmanto	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22.	Susanti	Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
23.	Diyah Puspitarini	Ketua Subkomisi Advokasi	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
24.	Yosi Diani Tresna	Perencana Ahli Madya pada Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
25.	Sularsono	Perencana Ahli Madya pada Direktorat Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
26.	Yanto Bashri	Kepala Subdirektorat Pendidikan Agama Islam	Kementerian Agama



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	NAMA/KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	INSTANSI
		pada SMP/SMPLB, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam	
27.	Noryanto	Kepala Subdirektorat Fasilitasi Kekayaan Intelektual pada Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Kementerian Kebudayaan
28.	Meta Ambar Pana	Kepala Subdirektorat Lembaga dan Pranata Kebudayaan pada Direktorat Bina Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kementerian Kebudayaan
29.	Sri Utami	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
30.	Yulanto Araya	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan	Kementerian Hukum
31.	Saima Sipahutar	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak	Kementerian Sosial
32.	Siti Maratul Fadhillah	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
33.	Meike Anastasia	Ketua Tim Kerja Pendidikan Khusus pada Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
34.	Dwi Adi Maryandi	Ketua Tim Kerja Tata Kelola Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan pada Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer	Kementerian Kesehatan
35.	Heny Lestary	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Kementerian Kesehatan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	NAMA/KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	INSTANSI
36.	Nia Kurniawati	Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Direktorat Kesehatan Lingkungan	Kementerian Kesehatan
37.	Kadek Aditya Vermana	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan	Kementerian Hukum
38.	Sugiandi Surya Atmaja	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Kementerian Agama
39.	Asriani Sri Wahyuni	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media	Kementerian Komunikasi dan Digital
40.	Hardy Kembar Pribadi	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Komunikasi Publik	Kementerian Komunikasi dan Digital
41.	Lismomon Nata	Windyaishwara Ahli Muda/Ketua Tim Kerja Pengembangan Program Bina Ketahanan Remaja pada Direktorat Bina Ketahanan Remaja	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
42.	Shara Zakia Nissa	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Pusat Penguatan Karakter	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
43.	Ahmad Kholilurrahman	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Direktorat Pesantren Ditjen Pendidikan Islam	Kementerian Agama
44.	Patricia Olivia Jelalu	Analisis Pembinaan Umat pada Subdirektorat Pemberdayaan Umat Direktorat Urusan Agama Katolik	Kementerian Agama
45.	Muh Bahtiar Ali Basya	Analisis Permasalahan Hukum pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam	Kementerian Agama
46.	Yuniar Anastasya Wardany	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Kementerian Perhubungan

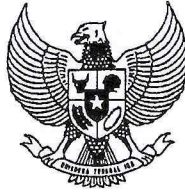




MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	NAMA/KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	INSTANSI
47.	Puguh Rianggono	Penelaah Teknis Kebijakan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Kementerian Perhubungan
<b>VI.</b>	<b>Sekretariat:</b>		
1.	Andi Nirmalasari	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	Budi Hartono	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.	Wiyarso Suwarsono	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.	Noel Sita Rukmi	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.	Eti Sri Nurhayati	Perencana Ahli Muda pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6.	Yeyep Mulyana	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7.	Sekar Santi Nastiti	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8.	Fildza Aisyantifa Kautsar	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9.	Galang Armada Jala	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

<b>NO.</b>	<b>NAMA/KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN</b>	<b>INSTANSI</b>
10.	Silvia Sahrul	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11.	Gondho Kresnoadi Puspowardoyo	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12.	Khairul Anwar	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13.	Olvy Amalia Harkinasih	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14.	Sahroni	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15.	Wuri Fitriana	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.	Enziana Maharani	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI